

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khakim, Pengantar hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung PT Citra Aditya Bakti 2007).
- Adrian sutendi ,hukum Perburuhan (jakarta sinar Grefikasi 2009).
- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ,dinamika dan teori*, (Bogor : Ghalia Indonesia 2010).
- Agusmidah, *Dinamika & Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Ayu Puspasari, Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerja Atau Buruhnya Sebagai Peserta Jaminan Sosial, Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
- Djoko Triyanto ,Hubungan Kerja Pada Perusahaan Jasa Kontruksi (Bandung:Mandar mMaju ,2004)
- Edi suharto, Konsepsi dan Strategi Jaminan Sosial Diakses tanggal 27 Februari 2020
- Lalu Husni, *Pengantar hukum ketenaga kerjaan indonesia*, (Jakarta: PR Raja Grafindo Persada, 2003).
- Neil Gilbert, *Transformation Of the Welfare State: The Silent Surrender Of Public Responsibility*, (Oxford University Press New York, 2002) Hlm 61-67
- Ridwan Marpaung ,kamus populer pekerja sosial (Jakarta: mutiara 1988).
- Sri nur hari susanto .,2019 karater yuridis sanksi hukum adminitrasi: pendekatan komarasi” adminitive law & Governance jounar=l. volume 2 edisi 1 march 2019
- W.riawan tjandra ,hukum Admiitras Negara (Yogyakarta:sinar Grafikasi 2018)

Sri Subiandini Gultom, Aspek Hukum Hubungan Industrial, Jakarta, Hecca Mitra `Utama, 2005.

Muhamad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2012.

Imelda Sutoyo, I Made Sarjana, I Nyoman Mudana, Pelaksanaan Tanggung Jawab Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerjaanya Menjadi Peserta Bpjs Di Kotamadya Denpasar, Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Sudikno Martokusumo, Mengenai Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 1999.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007).

Zaeni asyhadie. *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hukum Kerja*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013).

Zeeni asyhadie, *Aspek-aspek hukum sosial tenaga kerja di indonesia* (mataram: rajawali press 2007).

B. Karya Ilmiah, Jurnal dan Lain-lain:

Sholikhah, S. U. (2016). *Polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas PGRI Yogyakarta).

Kanyaka Prajnaparamita, Aspek Hukum Sertifikat Layak Fungsi (SLF) bangunan Dalam Rangka Penghindaran Kecelakaan Kerja, *Administrative Law & Governance Journal* Vol 1 Edisi 4 Nov 2018

Wati, N. E. (2015). *Asuransi Ketenagakerjaan Dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Sebagai Standarisasi Asuransi Ketenagakerjaan Dalam Tinjauan*

Fatwa DSN-MUI (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Solechan ,*Pengawasan Pelaksanaan Sistem Outsourcing yang Berbasis Pada Hak Asasi Manusia* Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2,June 2019

Suhartoyo. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit*. Adminitrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi 2 Mei 2018

Sonhaji, “*Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/ PDT.SUS-PHI/ 2016 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja*”, Administrative Law & Governance Journal, Vol.1 Edisi Khusus I 2018.

Suhartoyo. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit*. Adminitrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi 2 Mei 2018

Kanyaka Prajnaparamita,*Perlindungan Tenaga Kerja Anak ,Adminitrative Law & Governance Journal Vol .1 Edisi Khusus 1 2018 ,Hlm 113*

C. Situs Internet:

<https://jateng.tribunnews.com/2019/07/26/begini-cara-pendaftaran-peserta-dan-klaim-di-bpjs-ketenagakerjaan> diakses pada tanggal 6 Desember 2019

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/843/Setahun,-Klaim-BPJS-Ketenagakerjaan-di-Demak-Capai-Rp-1,9-Miliar> diakses pada tanggal 28 november2019

[http:// www.bpjstenagakerjaan .go .id/page/profil/visi-dan-misi.html](http://www.bpjstenagakerjaan.go.id/page/profil/visi-dan-misi.html)

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54ca6169f13ce/belum-daftar-bpjs-ketenagakerjaan--kejaksaan-panggil-300-perusahaan> diakses tanggal 05/08/2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55fec6cc534da/sanksi-jika-tidak-mengikutsertakan-karyawan-dalam-bpjs/> diakses tanggal 05/08/2020.

D. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang nomor 24 tahun 2001 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial